

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SISIPA KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Handayanti Siregar^{1*}), Nursiah Hasibuan², Elfi Syahri Ramadhona³

¹*Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Indoensia*

^{2,3}*Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Indoensia*

Email Korespondensi : handayanisiregar9@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang nantinya dapat memberi gambaran tentang peranan kepala desa dan faktor pendorong serta penghambatnya di Desa Sisipa Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kata kunci: Peranan, Kepala Desa, Pembangunan

I. Latar Belakang Penelitian

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, penyertaan peran serta, prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diletakkan di daerah kabupaten. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang

dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. 2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. 3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa. 4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sisipa Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

II. Pengertian Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Peranan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto 2003: 243)

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi. Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

2.2 Pengertian Pembangunan

Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama defenisi tersebut yaitu: 1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (capacity). 2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan (equity). 3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada

masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment). 4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability). 5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (capacity), tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampuan disini meliputi, fisik, mental, dan spiritual. Segi-segi tersebut haruslah mengalami perubahan. Kedua, kebersamaan (equity) atau keadilan sosial. Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, kekuasaan (empowerment), hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka dalam memberi respon terhadap perubahan. Keempat, ketahanan dan kemandirian (sustainability), implikasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber-sumber yang ada harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan mandiri. (Ndraha, 1990: 35)

2.3 Pemerintah Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai

suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia.

Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

III. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan

mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sisipa Kecamatan Batang Toru termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat.

4.1 Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan total atau penelitian sensus yakni keseluruhan dari informan tersebut termasuk adalah: a. Kepala Desa b. Tokoh-tokoh masyarakat c. Kepala Dusun d. Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Sisipa.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang pengelolaan arsip inaktif Diskominfo Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Metode *Interview* (Wawancara)

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (in-depthinterview) dengan narasumber (key informan) dengan berpedoman pada interview guidances yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjaringan informasi akan diakhiri.

3. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia

dalam bentuk arsip/dokumen dan dapat melengkapi hasil wawancara.

4.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu agar hasil penelitian nantinya dapat memberi gambaran tentang peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sisipa.

V. Hasil Penelitian

Kesimpulan yang dapat diangkat sesuai hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian terhadap peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Sisipa Kabupaten Batang Toru, antara lain:

1. Peranan Pemerintah Desa Sisipa dalam meningkatkan pembangunan meliputi 3 hal yaitu Pembangunan infra struktur dan pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Upaya kepala Desa Sisipa dalam meningkatkan pembangunan antara lain mengatasi Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal terdiri dari aspek

sumber daya manusia atau yaitu meningkatkan kualitas apparat pelaksana apparat, mengatasi ketersediaan sarana dan prasarana kerja agar memadai,

VI. Daftar Pustaka

Ali Mufiz, Drs,1995, *Pengantar Administrasi Negara*, Universitas Terbuka. Andy Sutardy, MBA,
Amini, 1973, *Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta
Dadang Solihin, MA. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Depdikbud RI, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
Handayaningrat, Soewarno, 1982, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

Ibnu Syamsi, Drs. 1983, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Bina Aklsara, Jakarta
Joko Prakoso, SH, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta
Nainggolan, 1984, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Depdikbud, Jakarta
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas 2001, Lembaran Daerah Sibuhuan Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. S.P. Siagian, MPA, 1983, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta
Sulastomo, 1999, *Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta)*, Jakarta
Surachmad, Winarno, 1972, *Dasar-dasar Tehnik Research*, Tarsito,